

JMHT Vol. XIII (3): 146-154, Desember 2007
ISSN: 0215-157X

Formulasi Kebijakan Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat di Taman Nasional Gunung Ciremai

Policy Formulation of Collaborative Forest Management in The Mount Ciremai National Park

Farma Yuniandra^{1)*}, Cecep Kusmana²⁾ dan Dodik Ridho Nurrochmat³⁾

¹⁾ Praktisi Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar

²⁾ Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB

³⁾ Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB

Abstract

Implementation of Collaborative Forest Management (CFM) at 25 villages in the Mount Ciremai, Kuningan Regency, West Java Province has become a problem because of specifying as national park. The objectives of this research were to analyze policy of CFM, examining implementation and it's impact in Mount Ciremai National Park, and to formulate policy strategy of CFM in Mount Ciremai National Park. Methods of this research were policy analysis, descriptive analysis, AHP, and SWOT. Implementation of the CFM policy in Kuningan Regency consisted of: socialization, forming of CFM Forum, mapping, inventory, planning of village, NKB, NPK, and village regulation. Economic impact from the policy of CFM in Kuningan Regency contributed the income to about 7,71% from the nominal of Rp 3.336.573,- per capita per year and poverty rate after CFM in general was relatively low. This research showed that CFM policy strategies that should be applied in Mount Ciremai National Park were socialization of economic value of the national park, regulation's intervention, developing the utilization of national park, and empowerment of the community economic.

Keywords: *policy formulation, collaborative forest management, national park, community economic*

Pendahuluan

Perubahan fungsi kawasan hutan di Gunung Ciremai menjadi taman nasional memunculkan reaksi berbeda dari berbagai kalangan. Sebagian pihak, antara lain Pemda Kabupaten Kuningan dan Universitas Kuningan menyambut positif perubahan kawasan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional. Sebagian pihak yang lain, seperti sejumlah personil Lembaga Pelayanan Implementasi-Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (LPI-PHBM) dari unsur LSM dan perorangan serta masyarakat pelaku kegiatan PHBM di kawasan hutan Gunung Ciremai menolak, belum menerima atau setidaknya mengkritisi proses penetapan Taman Nasional Gunung Ciremai dan proses lanjutannya.

Hal ini dikarenakan pada sebagian kawasan hutan Gunung Ciremai yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan terdapat 25 desa pada tujuh kecamatan yang telah dalam proses implementasi PHBM dan sebagian diantaranya telah melaksanakan negosiasi dan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) pada 18 desa dan Nota Perjanjian Kerjasama (NPK) pada lima desa dengan Perum Perhutani serta melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi taman nasional berarti pengelola hutan akan berganti dan kesepakatan kerja sama yang telah dibuat menjadi tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu, agar permasalahan di atas tidak berlarut-larut dan hutan yang semakin sedikit ini bisa dikelola secara lestari perlu rasanya kebijakan yang telah ditetapkan dan merupakan salah satu instrumen yang cukup penting dalam suatu pengelolaan untuk dikaji kembali keefektifan dan keefisienannya serta dicari strategi kebijakan terbaik dalam PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

*Penulis untuk korespondensi,
email: fyuniandra@yahoo.com

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa aspek yang perlu dijawab dalam penelitian ini, mengenai:

1. kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
2. implementasi dan dampak kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
3. strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan memformulasi strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan secara spesifik, yaitu:

1. menganalisis kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
2. mengkaji implementasi dan dampak kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
3. merumuskan strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan untuk melihat implementasi dan dampak kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai dilakukan pada tiga desa sampel secara *purposive* yang tersebar merata di utara, tengah dan selatan Taman Nasional Gunung Ciremai, yaitu Desa Padabeunghar, Linggarjati dan Karangsari. Waktu penelitian dilaksanakan selama empat belas bulan selama Januari 2006-Februari 2007.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara survey. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung dari responden lewat kuisisioner dan wawancara dengan para *stakeholders* di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen hasil studi atau penelitian, peraturan perundang-undangan, peta-peta

dan data pendukung lainnya dari berbagai sektor yang terkait, baik nasional maupun lokal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemda dan lembaga non pemerintah.

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

1. analisis kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dengan analisis normatif dan positif;
2. analisis implementasi dan dampak kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat secara deskriptif, baik kuantitatif maupun kualitatif;
3. perumusan strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dengan metode (AHP) dan SWOT yang diadopsi dan dimodifikasi dari Shrestha *et al.* (2004).

Di samping mempunyai kelebihan dengan kemudahan pemakaian, menurut Tiryana (2005) metode AHP mempunyai kelemahan dengan adanya kompensasi atau pengaruh nilai rata-rata. Oleh karena itu, untuk menghindari kelemahan tersebut, maka dalam rangka perumusan strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat yang mempunyai fungsi utama untuk ekologi diberi bobot 55%, sosial 30% dan ekonomi 15%.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai

Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari dua kategori, yaitu:

1. peraturan perundang-undangan yang disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah;
2. peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

yaitu Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan peraturan lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan

disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

No.	Peraturan Perundang-undangan
A	Undang-Undang
1	Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria
2	Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
3	Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4	Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
5	Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)
6	Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
8	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
9	Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10	Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
B	Peraturan Pemerintah
1	Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
2	Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
3	Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4	Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
5	Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
6	Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
7	Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
C	Peraturan Presiden
1	Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
D	Peraturan Daerah
1	Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 38 tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Gunung Ciremai
2	Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendakian Gunung Ciremai
3	Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Pendakian Gunung Ciremai

Tabel 2. Implementasi PHBM di Kabupaten Kuningan Tahun 2001-2004

No.	Tahun	Desa	NKB			NPK			
			Desa	%	Luas (ha)	Desa	%	Luas (ha)	%
1	2001	3	3	100,00	123,35	3	100,00	123,35	100,00
2	2002	36	26	72,22	11.394,74	5	13,89	281,25	2,47
3	2003	60	39	65,00	8.365,19	3	5,00	296,79	3,55
4	2004	32	11	34,38	971,54	3	9,38	135,75	13,97
Jumlah		131	79		20.854,82	14		837,14	

Sumber: LPI-PHBM Kabupaten Kuningan

Implementasi dan Dampak Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Implementasi PHBM terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pembentukan Forum PHBM, pemetaan, inventori, perencanaan desa, NKB, NPK dan Peraturan Desa. PHBM yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2001 di Kabupaten Kuningan telah mencapai hasil-hasil, seperti tertera pada Tabel 2. Sedangkan implementasi PHBM pada 3 desa contoh terdapat pada Tabel 3.

PHBM telah memberi kesempatan bagi masyarakat desa sekitar hutan untuk meningkatkan pendapatannya dan juga berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan. Dari hasil kuisioner, wawancara dan survey yang dilakukan terhadap petani PHBM di desa contoh, terdapat kontribusi pendapatan PHBM pada pendapatan rumah tangga sebesar 7,71%, yaitu Rp 924.905,- dari Rp 11.957.952,- seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 5 menunjukkan tingkat kemiskinan masyarakat di desa contoh setelah PHBM yang

secara umum relatif lebih baik dari pada tingkat kemiskinan Kabupaten Kuningan dan Indonesia. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kuningan sebelum dan setelah PHBM ada penurunan sekitar 1,30% atau hanya 0,26% per tahun dan tingkat kemiskinan Indonesia sebelum dan setelah PHBM ada penurunan sekitar 1,39% atau hanya 0,23% per tahun. Tingkat kemiskinan di desa contoh sebelum PHBM (tahun 2000) tidak ada data.

Disparitas pendapatan dikategorikan tinggi, jika nilai Koefisien Gini lebih dari 0,5, nilai 0,4-0,5 dikategorikan sedang dan nilai di bawah 0,4 ialah disparitas rendah. Tabel 6 menunjukkan nilai Koefisien Gini dan persentase distribusi pendapatan rumah tangga per tahun pada masing-masing kuintil pada tiga desa contoh. Hal ini menunjukkan, bahwa nilai Koefisien Gini dari pendapatan rumah tangga per tahun pada ketiga desa sampel merupakan disparitas pendapatan yang rendah karena Koefisien Gini di bawah 0,4. Rata-rata Koefisien Gini dari pendapatan rumah tangga per tahun pada desa contoh ialah 0,28 yang berarti disparitas pendapatan di desa contoh relatif cukup terdistribusi secara baik.

Tabel 3. Implementasi PHBM pada 3 Desa Contoh

No.	Desa	Kecamatan	BKPH	RPH	Tahun	NKB (Ha)	NPK	
							Luas (Ha)	%
1	Padabeunghar	Pasawahan	Linggarjati	Pasawahan	2002	1.200,46	36,90	3,07
2	Linggarjati	Cilimus	Linggarjati	Setianegara dan Jalaksana	2003	394,83	42,26	10,70
3	Karangsari	Darma	Linggarjati	Darma	2003	72,63	-	-
Jumlah						1.667,92	79,16	

Sumber: LPI-PHBM Kabupaten Kuningan

Tabel 4. Pendapatan Petani PHBM di Desa Contoh dari PHBM dan Non PHBM

No.	Desa sampel	Pendapatan				Jumlah (Rp)
		Non PHBM		PHBM		
		(Rp)	%	(Rp)	%	
1	Padabeunghar	9.635.428,-	93,81	636.143,-	6,19	10.271.571,-
2	Linggarjati	12.827.571,-	93,09	952.000,-	6,91	13.779.571,-
3	Karangsari	10.636.143,-	89,96	1.186.571,-	10,04	11.822.714,-
Rata-rata		11.033.047,-	92,29	924.905,-	7,71	11.957.952,-

Sumber: Data primer (2006)

Tabel 5. Tingkat Kemiskinan Sebelum dan Setelah PHBM

No.	Waktu	Desa Contoh (%)				Kuningan (%)	Indonesia (%)
		Padabeunghar	Linggarjati	Karangsari	Rata-rata		
1	Sebelum PHBM	-	-	-	-	16,36	19,14
2	Setelah PHBM	11,43	8,57	8,57	9,52	15,06	17,75

Sumber: Data primer (2006), Bapeda Kabupaten Kuningan dan BPS

Tabel 6. Distribusi Pendapatan Menurut Kelas Pendapatan di Desa Contoh

No.	Desa	Koefisien Gini	Pendapatan (%)				
			Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
1	Padabeunghar	0,31	5,99	12,03	20,70	25,53	35,75
2	Linggarjati	0,35	4,88	10,89	19,05	26,69	38,49
3	Karangsari	0,18	10,79	17,52	19,33	22,16	30,21
	Rata-rata	0,28	7,22	13,48	19,69	24,79	34,82

Sumber: Data primer (2006)

Tabel 7. Sumber Pendapatan Rumah Tangga Peserta PHBM di Desa Contoh

No.	Sumber Pendapatan	Desa (%)			Rata-rata (%)
		Padabeunghar	Linggarjati	Karangsari	
1	Pertanian	45,14	61,03	47,37	51,18
2	PHBM	6,19	6,91	10,04	7,71
3	Lainnya	48,67	32,06	42,59	41,11
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data primer (2006)

Tabel 8. Variabel yang Berhubungan dengan Keuntungan dari PHBM

No.	Variabel	Koefisien	Standar Error	t-ratio
1	Konstanta	-920591	747977	-1.23
2	Kelas umur	121772	110582	1.10
3	Umur produktif	229844	258663	0.89
4	Pendidikan	-192503	119602	-1.61*
5	Jumlah anggota rumah tangga	-100339	80511	-1.25
6	Pendapatan rumah tangga	0.10351	0.01526	6.78***
7	Tingkat kemiskinan	649177	271985	2.39**
8	Tipe rumah	-133946	109047	-1.23
9	Luas kepemilikan lahan	-115241	160902	-0.72
10	Luas lahan PHBM	-143484	132020	-1.09
11	Waktu kerja PHBM	2809	28671	0.10
12	Porsi pendapatan dari PHBM	9565873	733959	13.03***

Sumber: Data primer (2006), regresi linier, peubah terikat: pendapatan tahunan rumah tangga dari PHBM, $n = 105$; *** signifikan pada tingkat kepercayaan 1%, **signifikan pada tingkat kepercayaan 5%, * signifikan pada tingkat kepercayaan 10%

Rata-rata pendapatan peserta PHBM pada 3 desa sampel sekitar Rp 3.336.573,- per kapita per tahun, dimana jauh di atas garis kemiskinan (320 kg beras atau Rp 960.000,- per kapita per tahun saat ini). Hal ini diperkuat lagi dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah permanen, yaitu sekitar 73,33% mempunyai rumah permanen. Rumah tangga relatif tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap PHBM sebagai sumber pendapatan. Pada Desa Linggarjati, sekitar 6,91% pendapatan rumah tangga berasal dari PHBM,

seperti tumpang sari dan sebagainya. Sedangkan di Desa Karangsari, kontribusi PHBM sekitar 10,04% terhadap pendapatan rumah tangga dan di Desa Padabeunghar 6,19% dari pendapatan rumah tangga berasal dari PHBM disajikan pada Tabel 7.

Selanjutnya, keuntungan dari PHBM yang secara signifikan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pendapatan rumah tangga, tingkat kemiskinan dan porsi pendapatan dari PHBM ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 9 menggambarkan hasil analisis regresi linier dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat. Tingkat kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan tahunan rumah tangga dari PHBM dan porsi pendapatan dari PHBM.

Strategi Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Metode AHP dan SWOT terdiri dari beberapa langkah, yaitu identifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan klasifikasi serta evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan (Kurttila *et al.*, 2000; Ananda and Herath, 2003).

Identifikasi *stakeholders* Berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya, *stakeholders* yang terlibat dalam PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. primer langsung ialah *stakeholders* yang terlibat dan atau memperoleh dampak langsung;
2. primer tidak langsung ialah *stakeholders* yang terlibat secara tidak langsung, tetapi memperoleh dampak langsung;
3. sekunder ialah *stakeholders* yang tidak terlibat langsung dan tidak memperoleh dampak secara langsung.

Klasifikasi faktor-faktor keputusan Menurut Shrestha *et al.* (2004), identifikasi dan klasifikasi faktor-faktor keputusan dilakukan dengan studi pustaka, survey lapangan dan *Focus Group Discussion* (FGD). Namun, karena keterbatasan peneliti hanya dilakukan studi pustaka yang mendapatkan 12 faktor keputusan dan kemudian diletakkan pada masing-masing kelompok SWOT Tabel 10.

Tabel 9. Analisis Regresi dari Variabel yang Berhubungan dengan Tingkat Kemiskinan

No.	Variabel	Koefisien	Standar Error	t-ratio
1	Konstanta	0.8500	0.2648	3.21***
2	Kelas umur	0.03069	0.04107	0.75
3	Umur produktif	0.06355	0.09591	0.66
4	Pendidikan	-0.07309	0.04423	-1.65*
5	Jumlah anggota rumah tangga	-0.06097	0.02937	-2.08**
6	Pendapatan rumah tangga	0.00000001	0.00000001	0.73
7	Tipe rumah	0.02102	0.04062	0.52
8	Luas kepemilikan lahan	0.07564	0.05919	1.28
9	Luas lahan PHBM	0.00379	0.04917	0.08
10	Waktu kerja PHBM	0.00748	0.01058	0.71
11	Pendapatan tahunan rumah tangga dari PHBM	0.00000009	0.00000004	2.39**
12	Porsi pendapatan dari PHBM	-1.5662	0.4268	-3.67***

Sumber: Data primer (2006), regresi linier, peubah terikat: tingkat kemiskinan, $n = 105$; ***signifikan pada tingkat kepercayaan 1%, **signifikan pada tingkat kepercayaan 5%, *signifikan pada tingkat kepercayaan 10%

Tabel 10. Faktor-faktor SWOT yang Mempengaruhi Strategi Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

No.	<i>Strength</i>	<i>Opportunity</i>
1	Potensi keanekaragaman hayati, ekowisata dan jasa lingkungan yang besar	Permintaan ekowisata dan jasa lingkungan yang cukup besar
2	Kerja sama <i>stakeholders</i> yang cukup baik	Iklim usaha yang cukup kondusif
3	Dukungan pemerintah dan <i>stakeholders</i> lainnya yang cukup menjanjikan	Investasi dari pihak luar yang peduli terhadap kelestarian hutan
<i>Weakness</i>		<i>Threat</i>
1	Keanekaragaman hayati, satwa dan habitatnya yang sangat sensitif	Gangguan terhadap hutan yang cukup tinggi
2	Kapasitas <i>stakeholders</i> yang relatif rendah	Jumlah penduduk yang cukup besar
3	Ketergantungan masyarakat terhadap hutan cukup tinggi	Pasar produk kayu yang cukup potensial

Sumber: Data primer (2006)

Tabel 11. Evaluasi faktor internal dan eksternal PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

No.	Faktor-faktor internal eksternal	Rata-rata
1	<i>Strength</i>	0,259
2	<i>Weakness</i>	0,255
Skor Faktor <i>Strength</i> – <i>Weakness</i>		0,004
3	<i>Opportunity</i>	0,271
4	<i>Threat</i>	0,215
Skor Faktor <i>Opportunity</i> – <i>Threat</i>		0,056

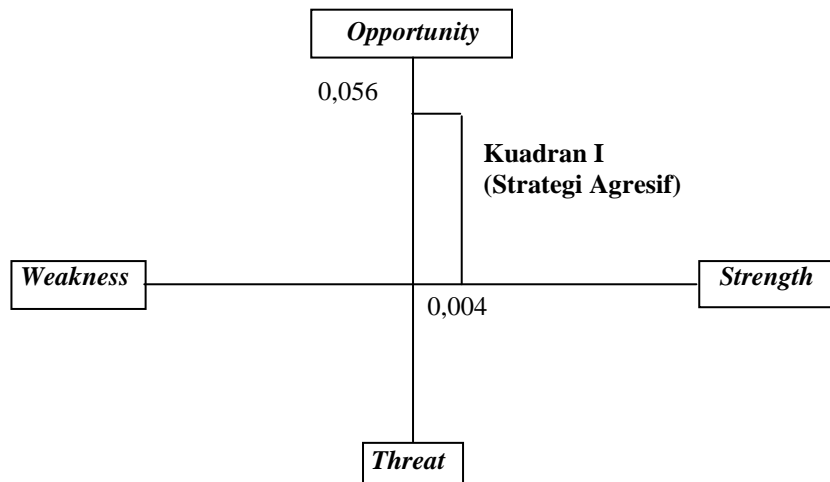
Sumber: Data primer (2006)

Evaluasi faktor-faktor keputusan Pada tingkat pertama dari struktur hirarki dalam perumusan strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat rasio konsistensinya pada perbandingan berpasangan cukup bagus. Hal ini berarti perbandingan berpasangan pada tingkat ini tidak menyulitkan *stakeholders* dan dengan mudah dapat mengambil keputusan yang prioritas.

Data yang diperoleh dari responden dihitung secara terpisah untuk mendapatkan nilai faktor prioritas dan semua prioritas, sehingga memperoleh nilai rata-rata. Nilai faktor prioritas menunjukkan kepentingan relatif dari masing-masing faktor SWOT. Nilai semua prioritas diperoleh dengan mengalikan nilai faktor prioritas dengan skala

parameter yang menggambarkan kepentingan relatif dari masing-masing faktor terhadap semua kelompok SWOT. Nilai rata-rata menggambarkan pilihan semua responden terhadap PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Perbandingan berpasangan membuktikan, bahwa pada tingkat ini cukup rumit dengan rasio konsistensi mencapai 9%. Hal ini masih dapat diterima, namun memang lebih tinggi dari pada tingkat sebelumnya.

Nilai rata-rata dari faktor-faktor internal dan eksternal yang didapat dibandingkan seperti Tabel 11. Hasil tersebut, kemudian diletakkan pada Gambar 1, sehingga terlihat situasi saat ini berada pada kuadran I dengan strategi agresif.



Gambar 1. Posisi Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Analisis SWOT yang merupakan analisis situasi, maka jika situasinya berubah maka strateginya juga akan berbeda. Namun, berdasarkan situasi saat ini dari analisis SWOT disarankan strategi (S-O), sebagai berikut:

1. sosialisasi nilai ekonomi Taman Nasional Gunung Ciremai dan intervensi regulasi;
2. pengembangan pemanfaatan Taman Nasional Gunung Ciremai;
3. pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai.

Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan PHBM di Kabupaten Kuningan terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pembentukan Forum PHBM, pemetaan, inventori, perencanaan desa, NKB, NPK dan Peraturan Desa.
2. Dampak ekonomi dari kebijakan PHBM di Kabupaten Kuningan ialah terdapat kontribusi pendapatan PHBM pada pendapatan rumah tangga sebesar 7,71%, yaitu Rp 924.905,- dari Rp 11.957.952,- dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp 3.336.573,- per kapita per tahun dan tingkat kemiskinan masyarakat setelah PHBM secara umum relatif baik.
3. Rata-rata Koefisien Gini dari pendapatan rumah tangga per tahun ialah 0,28 yang berarti

disparitas pendapatan relatif cukup terdistribusi secara baik dan relatif tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap PHBM sebagai sumber pendapatan.

4. Keuntungan dari PHBM di Kabupaten Kuningan secara signifikan dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan rumah tangga, tingkat kemiskinan dan porsi pendapatan dari PHBM serta tingkat kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan tahunan rumah tangga dari PHBM dan porsi pendapatan dari PHBM.
5. Strategi kebijakan PHBM yang dapat diterapkan di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yaitu:
 - a. sosialisasi nilai ekonomi taman nasional dan intervensi regulasi;
 - b. pengembangan pemanfaatan taman nasional;
 - c. pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Saran

1. Perlu dilakukan penilaian ekonomi lainnya di Taman Nasional Gunung Ciremai, sehingga memiliki informasi nilai ekonomi dan kegiatan sosialisasi tentang nilai ekonomi kepada masyarakat mempunyai landasan informasi yang kuat.

2. PHBM yang sekarang ada pada kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai bisa tetap berjalan selama masa transisi ini dan kesepakatan lama masa transisi merupakan kebijakan bersama Pemda Kabupaten Kuningan dengan Departemen Kehutanan berdasarkan kepentingan, perkembangan permasalahan dan sebagainya.
3. Selama masa transisi ini, semua pihak bersama-sama secara bertahap berusaha melaksanakan strategi di atas karena perubahan pola budaya masyarakat memerlukan pendekatan yang bersifat elegan dan persuasif.

Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., and Kajanus, M. 2000. Utilising the Analytic Hierarchy Process AHP in SWOT Analysis-A Hybrid Method and it's Application to a Forest-Certification Case. *Forest Policy and Economics* 1: 41-52.

Shrestha, R.K., Alavalapati, J.R.R., and Kalmbacher, R.S. 2004. Exploring the Potential for Silvopasture Adoption in South Central Florida: An Application of SWOT-AHP Method. *Jurnal Agricultural Systems*:1-15.

Tiryana, T. 2005. Assessment of Sustainable Forest Management Using Fuzzy Rule-Based Model. *International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation*. Enschede.

Daftar Pustaka

Ananda, J. and Herath, G. 2003. The Use of Analytic Hierarchy Process to Incorporate Stakeholder Preferences in to Regional Forest Planning. *Forest Policy and Economics* 5: 13-26.